



Research Article

Etika Dalam Evaluasi Dan Asesmen Pendidikan (Prinsip-Prinsip Etika Dalam Evaluasi Dan Asesmen Pendidikan Perspektif Keadilan, Objektivitas, Dan Privasi)

Abdul Rahman Sidik¹, Dina Hermina², Nuril Huda³

1. Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
E-mail: abdulrahmansidik887@gmail.com



2. Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
E-mail: dinahermina@uin-antasari.ac.id

3. Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin
E-mail: nurilhuda@uin-antasari.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025
Available online : May 31, 2025

How to Cite: Abdul Rahman Sidik, Dina Hermina and Nuril Huda (2025) "Ethics in Educational Evaluation and Assessment (Ethical Principles in Educational Evaluation and Assessment from the Perspective of Fairness, Objectivity, and Privacy)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1569–1580. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2075.

Ethics in Educational Evaluation and Assessment (Ethical Principles in Educational Evaluation and Assessment from the Perspective of Fairness, Objectivity, and Privacy)

Abstract. This study aims to examine the ethical principles in educational evaluation and assessment and the application of ethical evaluation in the context of Islamic education. The research employs a qualitative approach through literature reviews and interviews with Islamic Education teachers at SMKN 3 Banjarmasin, analyzing data from books, journals, and digital sources. The findings reveal that evaluation and assessment are crucial components in education for measuring student achievement and improving educational quality. These practices must adhere to ethical principles such as fairness, objectivity, and privacy. Fairness ensures that all students are treated equally without discrimination through transparent and unbiased evaluation tools. Objectivity emphasizes assessment based on concrete data, avoiding personal bias, and using clear assessment rubrics. Privacy involves protecting student data, limiting access to authorized parties, and respecting students' rights to keep their information confidential. In Islamic education, these principles reflect the moral values of the Qur'an regarding justice and respect for individuals. Ethical evaluation fosters an inclusive learning environment and supports students' holistic development.

Keywords: Ethics, Evaluation, Educational Assessment, Justice, Privacy.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip etika dalam evaluasi dan asesmen pendidikan dan penerapan etika evaluasi dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan Guru PAI di SMKN 3 Banjarmasin, menganalisis data dari buku, jurnal, dan sumber digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi dan asesmen merupakan elemen penting dalam pendidikan untuk menilai capaian siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Praktik ini harus mengikuti prinsip etika seperti keadilan, objektivitas, dan privasi. Keadilan memastikan semua siswa diperlakukan setara tanpa diskriminasi melalui instrumen evaluasi yang transparan dan tidak memihak. Objektivitas menekankan penilaian berdasarkan data konkret, menghindari bias pribadi, dan menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Privasi melibatkan perlindungan data siswa, membatasi akses hanya pada pihak berwenang, dan menghormati hak siswa menjaga kerahasiaan informasi mereka. Dalam pendidikan Islam, prinsip ini mencerminkan nilai moral Al-Qur'an tentang keadilan dan penghormatan individu. Etika evaluasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Kata Kunci : Etika, Evaluasi, Asesmen Pendidikan, Keadilan, Privasi.

PENDAHULUAN

Evaluasi dan asesmen merupakan elemen vital dalam sistem pendidikan yang bertujuan mengukur pencapaian siswa dan efektivitas pengajaran. Selain menilai hasil belajar, evaluasi juga berperan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Tujuan evaluasi dalam pendidikan sangat beragam, mulai dari memberikan umpan balik bagi siswa, mengukur efektivitas pengajaran, hingga mendukung pengembangan kurikulum secara berkelanjutan (Nitko & Brookhart, 2011). Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif berfungsi memantau perkembangan siswa selama proses belajar, menyediakan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu siswa dan guru menemukan area yang memerlukan perbaikan (Gronlund & Waugh, 2009). Dengan demikian, pentingnya evaluasi dan asesmen tidak dapat dipandang sebelah mata karena keduanya berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, evaluasi dan asesmen dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari tes tertulis, observasi, hingga penilaian proyek. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dalam asesmen, pendidik dapat melihat kemajuan dan kebutuhan siswa dari berbagai perspektif, yang menghasilkan gambaran kemampuan yang lebih komprehensif.

Asesmen sumatif dapat memengaruhi motivasi siswa dengan cara yang beragam. Jika diterapkan dengan benar, asesmen sumatif dapat meningkatkan motivasi belajar. Selain itu, guru sering menyesuaikan strategi pengajaran mereka berdasarkan hasil asesmen untuk mengatasi kelemahan siswa atau memperdalam pemahaman mereka (Halim, 2024). Menggabungkan metode asesmen formatif dan sumatif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Penggunaan metode evaluasi yang beragam memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat, memberikan manfaat signifikan bagi pembelajaran. Guru yang terampil dalam memanfaatkan asesmen, memberikan umpan balik bermakna, dan mengambil keputusan berbasis data, dapat membangun lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung (Arta, 2024).

Namun, dalam melakukan evaluasi dan asesmen, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh pendidik. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, objektivitas, dan privasi. Tanpa penerapan prinsip-prinsip etika ini, hasil evaluasi dan asesmen bisa saja tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari siswa, sehingga dapat merugikan mereka. Misalnya, jika seorang guru menerapkan standar yang berbeda dalam penilaian untuk siswa dari latar belakang yang berbeda, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses belajar.

Dalam pendidikan Islam, etika evaluasi dan asesmen memegang peranan penting dengan cakupan yang luas. Pendidikan Islam menekankan keadilan dan integritas sebagai prinsip fundamental yang harus diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam penilaian akademik. Etika dalam evaluasi ini mencakup nilai-nilai ajaran agama Islam yang menuntut pendidik untuk menegakkan kejujuran dan keadilan dalam setiap proses asesmen. Prinsip-prinsip ini terinspirasi dari Al-Qur'an, di mana banyak ayat yang mengingatkan pentingnya bersikap adil dan jujur, seperti yang termaktub dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8. Allah Swt. memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu, jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan (Salminawati, 2016) dan dalam surah lain seperti Surah An-Nisa ayat 135. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi panduan bagi pendidik dalam menjalankan tugas evaluasi terhadap peserta didik.

Dengan demikian, pentingnya evaluasi dan asesmen dalam pendidikan tidak hanya terletak pada aspek teknis dan metodologis, tetapi juga dalam penerapan prinsip-prinsip etika yang dapat menjamin keadilan, objektivitas, dan privasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan evaluasi dan asesmen dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang melibatkan penelusuran literatur, pencarian sumber-sumber relevan, serta pengumpulan data melalui berbagai media, seperti buku, jurnal, internet, dan artikel digital terkait. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul dari sumber yang dikumpulkan. Adapun penerapan prinsip-prinsip etika penilaian melalui wawancara langsung kepada Guru PAI di SMKN 3 Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Etika dalam Evaluasi dan Asesmen dalam Pendidikan

Prinsip-prinsip etika dalam evaluasi dan asesmen pendidikan merupakan pedoman untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses penilaian terhadap peserta didik. Prinsip-prinsip ini meliputi aspek keadilan, objektivitas, dan privasi yang harus dijaga dalam setiap tahap evaluasi.

Keadilan

Definisi Keadilan dalam Konteks Evaluasi

Prinsip keadilan, seperti yang diuraikan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* menjadi landasan moral untuk pembagian sumber daya, hak, dan peluang secara adil dalam masyarakat. Teori Rawls didasarkan pada dua prinsip utama: kesetaraan dasar dan perbedaan yang adil. Dalam kebijakan publik, prinsip ini berperan penting sebagai pedoman untuk merancang kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan distribusi yang merata (Wirata, 2024).

Keadilan berasal dari kata 'adil' yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil mengacu pada keputusan atau tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan bersifat relatif karena apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Dalam penerapannya, keadilan harus relevan dengan ketertiban umum yang diakui masyarakat. Skala keadilan bervariasi antar wilayah, didefinisikan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan norma ketertiban umum setempat (M.H, 2015).

Menurut Ibn Miskawayh, keadilan adalah keseimbangan yang berada di antara sikap berlebihan dan kekurangan. Ia menganggap keadilan sebagai kebajikan tertinggi, yang mencerminkan kesempurnaan dan keharmonisan, serta memiliki kedudukan yang mulia. Sementara itu, menurut Murtadha, keadilan dapat dimaknai sebagai persamaan (Nasution, 1999).

Keadilan dalam evaluasi pendidikan adalah prinsip etika penting yang menjadi dasar dalam penilaian siswa. Keadilan berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua siswa, tanpa memperhatikan latar belakang, kemampuan, atau karakteristik individu lainnya. Dalam pendidikan, keadilan memastikan setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan pengetahuannya tanpa bias atau diskriminasi. Menurut American Educational Research Association (AERA), penilaian yang adil adalah penilaian yang memperhitungkan karakteristik

individu dan konteks pengujian sehingga skor tes dapat diinterpretasikan secara valid sesuai tujuan penggunaannya.

Pentingnya Sikap Guru yang Adil dalam Evaluasi dan Penilaian: 1) Memberikan Kesempatan yang Setara, 2) Menghindari Bias dan Diskriminasi, 3) . Membangun Kepercayaan Diri Siswa, 4) Menciptakan Lingkungan Belajar yang Inklusif, 5) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi (Putri dkk., 2024).

Dalam praktiknya, keadilan dalam evaluasi dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti penyusunan instrumen evaluasi yang tidak memihak, penggunaan kriteria penilaian yang transparan, serta adanya mekanisme untuk menanggapi keberatan atau banding dari siswa. Penggunaan rubrik penilaian yang dirancang secara jelas dan terstandarisasi efektif dalam mengurangi subjektivitas penilaian serta meningkatkan keadilan. Dengan demikian, penyusunan instrumen evaluasi yang berkualitas terbukti mampu berperan penting dalam menciptakan evaluasi yang adil dan dapat diandalkan.

Dampak negatif dari ketidakadilan evaluasi adalah penurunan kinerja akademik. Siswa yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin menjadi kurang bersemangat untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau bahkan menunjukkan resistensi terhadap tugas-tugas akademik. Dalam kasus tertentu, hal ini dapat memperbesar kesenjangan pencapaian akademik antara kelompok siswa yang merasa diuntungkan dan dirugikan oleh ketidakadilan tersebut. Siswa yang merasa diperlakukan tidak adil dalam evaluasi cenderung mengalami penurunan motivasi belajar dan hasil akademis. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menyadari bagaimana penilaian mereka dapat mempengaruhi persepsi siswa terhadap keadilan dan integritas sistem pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, keadilan juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58). Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam evaluasi tidak hanya merupakan kewajiban profesional, tetapi juga merupakan tuntutan moral yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik.

Contoh Penerapan Keadilan dalam Asesmen

Penerapan prinsip keadilan dalam asesmen pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Keadilan dalam asesmen tidak hanya berkaitan dengan proses penilaian, tetapi juga dengan bagaimana instrumen asesmen dirancang dan diterapkan. Keadilan dalam asesmen mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan akses terhadap informasi dan sumber belajar, serta kesetaraan dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penilaian. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias yang dapat mempengaruhi hasil asesmen. Keadilan memastikan bahwa asesmen tidak bias dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa (Arta, 2024).

Sebagai contoh, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan dalam hasil ujian nasional antara siswa dari sekolah negeri dan swasta. Siswa dari sekolah swasta cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang lebih baik, yang dapat mempengaruhi hasil asesmen mereka. Hal ini menunjukkan perlunya desain asesmen yang mempertimbangkan latar belakang siswa agar semua siswa memiliki peluang yang sama untuk berhasil.

Selain itu, penerapan keadilan dalam asesmen juga mencakup penggunaan berbagai metode penilaian yang dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Misalnya, dalam kelas yang terdiri dari siswa dengan kebutuhan khusus, guru perlu menggunakan asesmen yang tidak hanya berbasis pada ujian tertulis, tetapi juga dapat mencakup proyek, presentasi, atau asesmen praktik. Dengan cara ini, siswa yang mungkin tidak dapat menunjukkan kemampuan mereka melalui ujian tertulis tetap memiliki kesempatan untuk berhasil menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Dalam konteks pendidikan Islam, keadilan dalam asesmen juga sangat relevan. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan pendidik untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam proses penilaian. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya keadilan, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 135 yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu." Prinsip ini harus diterapkan dalam konteks asesmen untuk memastikan bahwa setiap siswa dinilai secara objektif dan adil.

Objektifitas

Prinsip objektivitas berarti bahwa evaluasi hasil belajar dilakukan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Prinsip ini sering diartikan sebagai penilaian yang dilakukan secara 'apa adanya' (Sudijono, 1998). Menurut (Mulyadi, 2014) menyatakan bahwa, "Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota."

Prinsip objektivitas mengharuskan pelaksanaan evaluasi bebas dari pengaruh subjektivitas, baik terkait bentuk evaluasi maupun sikap dari evaluator itu sendiri (Sudaryono, 2012).

Prinsip objektivitas dalam evaluasi menekankan bahwa penilaian hasil belajar harus bebas dari pengaruh subjektivitas. Prinsip ini, sering disebut 'apa adanya' berarti materi evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bahan ajar yang diberikan. Dalam pemberian skor, tester harus menghindari bias, seperti halo effect—di mana tulisan rapi mendapat nilai lebih tinggi meskipun isinya sama dengan tulisan yang kurang rapi—serta mengesampingkan kesan masa lalu. Tester perlu berpikir dan bertindak sesuai kenyataan tanpa dipengaruhi kepentingan subjektif. Prinsip ini penting untuk menjaga kemurnian evaluasi, sehingga hasilnya mencerminkan penilaian yang benar-benar objektif (Qodir, 2017).

Objektivitas dalam evaluasi berarti menilai sesuai dengan kenyataan. Guru harus tegas menyatakan sesuatu sebagaimana adanya, misalnya menyebut hijau sebagai hijau dan merah sebagai merah, tanpa menyimpangkannya. Untuk mencapai

objektivitas, diperlukan data dan fakta yang akurat dan valid sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Dengan dukungan data dan fakta yang memadai, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun moral (DP, t.t.).

Pentingnya objektivitas dalam penilaian

Evaluasi dan asesmen pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Salah satu prinsip etika utama dalam evaluasi adalah objektivitas, yaitu kemampuan menilai siswa tanpa bias atau pengaruh subjektif. Menurut (Mardapi, 2012), asesmen adalah komponen krusial dalam pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui perbaikan dalam pembelajaran serta sistem penilaian yang lebih baik.

Cara Mencapai Objektivitas dalam Evaluasi

Meningkatkan objektivitas evaluasi dapat dilakukan dengan mengembangkan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Rubrik ini harus mencakup kriteria spesifik yang dapat diukur, sehingga semua penilai memiliki acuan yang sama. Misalnya, penggunaan rubrik penilaian terstandarisasi dapat meningkatkan konsistensi penilaian antar penilai. Selain membantu penilai memberikan nilai, rubrik juga memberikan transparansi kepada siswa mengenai harapan yang harus dipenuhi.

Penggunaan asesmen berbasis kinerja juga dapat mendukung objektivitas evaluasi. Asesmen ini memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan mereka dalam konteks nyata dan aplikatif. Contohnya, dalam pelajaran sains, siswa dapat diminta melakukan eksperimen dan melaporkan hasilnya. Penilaian terhadap laporan tersebut dilakukan menggunakan rubrik yang telah ditentukan, sehingga meminimalkan potensi bias dalam evaluasi.

Selanjutnya, pelatihan bagi para penilai juga merupakan langkah penting dalam mencapai objektivitas. Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru (Putri dkk., 2024), yaitu menekankan pentingnya memberikan pelatihan kepada guru dan evaluator lainnya agar mereka dapat mengenali dan mengatasi bias yang mungkin muncul selama proses penilaian. Misalnya, penilai perlu dilatih untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang sosial ekonomi siswa dapat memengaruhi hasil belajar, dan bagaimana cara menilai siswa secara adil tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut.

Dalam konteks pendidikan Islam, objektivitas dalam evaluasi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Misalnya, dalam menilai siswa, seorang pendidik harus mengingat prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam Surah An-Nisa ayat 135, Allah Swt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan." Ini menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam evaluasi pendidikan, keadilan harus selalu diutamakan. Dengan demikian, penerapan etika dalam evaluasi tidak hanya meningkatkan objektivitas tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif.

Privasi

Konsep Privasi dalam Konteks Asesmen

Warren dan Brandeis memperkenalkan konsep privasi melalui artikel mereka berjudul *The Right to Privacy* yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah di Sekolah Hukum Universitas Harvard. Artikel tersebut mendefinisikan privasi sebagai hak untuk tidak diganggu. Mereka menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak individu untuk menjaga kehidupan pribadi mereka (Achmad & Amanah, 2014)

Privasi adalah hak individu untuk menikmati kebebasan tanpa campur tangan publik, serta bebas dari pengungkapan informasi pribadi. 'Hak privasi' mencakup berbagai hak yang diakui dalam konsep kebebasan individu, termasuk perlindungan dari campur tangan pemerintah dalam urusan pribadi. Hak ini meliputi kebebasan untuk membangun hubungan, membuat keputusan hidup, serta menjalankan otonomi pribadi dalam konteks diri, keluarga, dan interaksi dengan orang lain (Garner, 1999).

Warren dan Brandeis berpendapat bahwa "Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition." (Rosadi, 2015) Privasi merupakan hak setiap individu untuk menikmati kehidupannya serta menuntut agar privasinya mendapat perlindungan.

Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris, yaitu *privacy* yang berarti kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, yang mana seseorang mengontrol arus informasi mengenai diri sendiri. Penggambaran lainnya mengenai privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain.

Privasi dalam konteks asesmen pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang sering kali diabaikan, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan kenyamanan siswa dalam mengikuti proses evaluasi. Dalam dunia pendidikan, privasi mencakup perlindungan data pribadi siswa, hasil asesmen, serta informasi terkait yang dapat mengungkap identitas individu.

Dalam UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 28 huruf G ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." (Kusnadi, 2021) termasuk dalam konteks pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip privasi dalam setiap proses asesmen yang dilakukan.

Salah satu contoh nyata dari pelanggaran privasi dalam asesmen adalah ketika hasil ujian siswa dipublikasikan tanpa izin. Hal ini tidak hanya melanggar hak privasi siswa, tetapi juga dapat memicu stigma sosial dan tekanan psikologis.

Penyelenggaraan Ujian Nasional memberi dampak pada keadaan psikologi siswa berupa perasaan cemas akan ketidakihtungan. (Spielberger, 1979) secara tidak langsung menjelaskan bahwa kecemasan muncul ketika seseorang menilai suatu situasi sebagai ancaman, yang kemudian disebut sebagai *stressor*. Ancaman yang

dimaksud dalam konteks ini adalah Ujian Nasional. Penilaian terhadap stressor merujuk pada cara individu memandang dan menafsirkan ancaman tersebut (Walgito, 2012). Cemasnya siswa ini dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka di masa depan. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data hasil asesmen, termasuk siapa yang berhak mengakses dan bagaimana informasi tersebut disimpan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan privasi dalam konteks penggunaan teknologi dalam asesmen. Dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak institusi pendidikan yang menggunakan platform online untuk melakukan evaluasi. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa tantangan baru terkait privasi data.

Dalam konteks pendidikan Islam, privasi juga memiliki dimensi etis yang mendalam. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan dan privasi individu merupakan prinsip yang sangat dihargai. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengungkapkan aib atau kelemahan orang lain, termasuk dalam konteks hasil asesmen. Oleh karena itu, penerapan etika privasi dalam asesmen pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap individu.

Penerapan prinsip privasi dalam asesmen pendidikan juga dapat meningkatkan kepercayaan antara siswa dan guru. Ketika siswa merasa bahwa informasi pribadi mereka dilindungi, mereka akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan untuk secara aktif menerapkan prinsip privasi dalam setiap tahap asesmen. Dengan melindungi data siswa, menghormati hak privasi mereka, dan menerapkan kebijakan yang transparan, pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung bagi semua siswa. Dalam konteks pendidikan Islam, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis yang mendalam dalam menjaga kehormatan individu.

Perlindungan Data Siswa dan Informasi Pribadi

Perlindungan data siswa dan informasi pribadi itu penting untuk memberikan perhatian khusus pada perlindungan data siswa dalam proses asesmen. Data pribadi siswa, seperti nilai, informasi medis, latar belakang keluarga, atau kondisi psikologis, harus dikelola dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Perlindungan ini meliputi praktik penyimpanan data secara aman, pembatasan akses, serta pembatasan penggunaan informasi tersebut hanya untuk kepentingan asesmen dan perkembangan pendidikan siswa.

Melalui upaya ini, hak privasi siswa dihormati, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dalam memberikan data yang relevan bagi proses pembelajaran dan asesmen.

Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Evaluasi pada Jurusan Akuntansi pada Mata Pelajaran PAI di SMKN 3 Banjarmasin.

Penerapan Prinsip Keadilan

“Untuk memastikan keadilan, saya selalu merancang instrumen evaluasi yang objektif dan berdasarkan pada indikator pencapaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, dalam penilaian ujian atau tugas, saya memastikan bahwa soal-soal yang diberikan mencakup seluruh materi yang telah diajarkan, dan tidak hanya berfokus pada satu bagian saja. Selain itu, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas sehingga siswa bisa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Salah satu yang paling penting adalah saya menggunakan kriteria penilaian secara keseluruhan yang jelas dalam setiap evaluasi, seperti ujian, tugas, atau penilaian terhadap sikap karena pembentukan karakter yang harus dimunculkan.”

“Saya juga berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa yang mungkin kesulitan dalam ujian. Misalnya, jika ada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena alasan yang sah, seperti sakit, saya memberi mereka kesempatan untuk mengikuti ujian di waktu lain tanpa ada pengurangan nilai.” (Hasil Wawancara dengan Abdullah Hayat, S.Pd.I. pada 19 November 2024).

Dari hasil wawancara ini tersebut menunjukkan bahwa guru mempunyai komitmen terhadap keadilan dengan memastikan evaluasi berbasis instrumen objektif dan indikator yang jelas. Melalui cakupan materi yang adil dan rubrik penilaian yang transparan, semua siswa mendapat kesempatan yang setara untuk menunjukkan kemampuan. Kesempatan ujian ulang tanpa penalti bagi siswa yang berhalangan menekankan bahwa kondisi individu dihormati tanpa mengorbankan standar evaluasi. Ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlakuan yang sama dan penyesuaian kebutuhan.

Penerapan Prinsip Objektivitas

“Saya berusaha untuk memberikan penilaian yang objektif dengan mengandalkan data dan bukti yang konkret. Nilai yang saya berikan didasarkan pada hasil ujian, tugas, dan observasi saya terhadap perilaku mereka di dalam kelas. Saya juga berusaha untuk tidak terbawa perasaan pribadi. Misalnya, jika saya merasa seorang siswa kurang aktif dalam diskusi kelas, saya tetap menilai mereka berdasarkan pencapaian lainnya, seperti nilai ujian atau tugas yang diberikan.” (Hasil Wawancara dengan Abdullah Hayat, S.Pd.I. pada 19 November 2024).

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penilaian yang didasarkan pada bukti konkret, seperti nilai ujian, tugas, dan observasi, mengurangi risiko bias pribadi. Dengan tetap memperhitungkan pencapaian lain, meskipun siswa kurang aktif dalam diskusi, guru menunjukkan pendekatan yang profesional dan menyeluruh. Hal ini menegaskan pentingnya data dalam memastikan bahwa penilaian murni mencerminkan performa siswa, bukan preferensi pribadi.

Penerapan Prinsip Privasi

“Saya menjaga kerahasiaan hasil evaluasi siswa dengan sangat hati-hati. Nilai mereka hanya saya beritahukan kepada siswa yang bersangkutan dan orang tua

mereka jika diperlukan terutama sekali ketika pembagian raport. Hasil evaluasi ini tidak saya sebarkan kepada teman-teman mereka karena saya menghormati privasi setiap siswa. Dalam hal ini, saya juga mengikuti kebijakan sekolah yang mengutamakan kerahasiaan nilai.” (Hasil Wawancara dengan Abdullah Hayat, S.Pd.I. pada 19 November 2024).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa guru menjaga kerahasiaan hasil evaluasi dengan tidak mempublikasikan nilai siswa kepada pihak lain, termasuk teman sekelas. Komitmen untuk hanya mengomunikasikan hasil kepada siswa bersangkutan atau orang tua mencerminkan penghormatan terhadap hak privasi siswa dan mengikuti etika profesional serta kebijakan sekolah. Ini menciptakan rasa aman bagi siswa dalam proses evaluasi.

Ketiga prinsip tersebut diterapkan secara holistik untuk menciptakan evaluasi yang adil, objektif, dan menghormati privasi. Pendekatan ini mendukung pengembangan lingkungan pembelajaran yang etis, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan secara normatif.

KESIMPULAN

Evaluasi dan asesmen adalah elemen penting dalam pendidikan untuk menilai capaian belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Praktiknya harus didasarkan pada prinsip etika seperti keadilan, objektivitas, dan privasi. Keberpihakan dihindari dengan instrumen evaluasi yang adil, transparansi kriteria, serta kesempatan setara bagi siswa. Objektivitas dicapai dengan mengandalkan data konkret dan rubrik penilaian yang jelas untuk mencegah bias. Privasi siswa dilindungi dengan menjaga kerahasiaan hasil evaluasi, membatasi akses data, dan mematuhi kebijakan privasi. Dalam pendidikan Islam, prinsip ini tidak hanya profesional tetapi juga moral, sejalan dengan ajaran Al-Qur’an yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap individu. Penerapan etika evaluasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik, memberikan panduan bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui asesmen yang etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. L., & Amanah, L. (2014). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(9).
- Arta, G. Y. (2024). Asesmen dalam Pendidikan: Konsep, Pendekatan, Prinsip, Jenis, dan Fungsi. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(3), 170–190. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i3.3925>
- DP, U. (t.t.). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EVALUASI DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI). Diambil 7 Januari 2025, dari <https://ejurnal.stkip-pb.ac.id/index.php/jurnal/article/view/176>
- Garner, B. A. (1999). *Black’s Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn.
- Gronlund, N. E., & Waugh, C. K. (2009). *Assessment of Student Achievement*. Pearson.

- Halim, A. (2024, Juni 1). Efektivitas Asesmen Sumatif dalam Pengukuran Capaian Pembelajaran Peserta Didik Kelas IV MIN 19 Bireuen. | EBSCOhost. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i6.776>
- Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). PENTINGNYA MEMAHAMI PENERAPAN PRIVASI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 11(2), 2. <https://doi.org/10.24036/tip.v11i2.137>
- Kusnadi, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Mardapi, D. (2012). Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan. *Nuha Litera*.
- M.H, P. D. A. S., S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Salemba Empat.
- Nasution, H. (1999). *Filsafat Islam*. Gaya Media Pratama.
- Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2011). *Educational Assessment of Students*. Pearson/Allyn & Bacon.
- Putri, K. E. S., Wahyuni, M. R., Hasibuan, W. F., & Mustika, D. (2024). Evaluasi Dan Penilaian Yang Adil Dalam Konteks Pendidikan Inklusi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 6. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.504>
- Qodir, A. (2017). *Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran*. K-Media.
- Rosadi, D. S. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Refika Aditama.
- Salminawati. (2016). *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Konsep Pendidikan yang Islami*. Citapustaka Media Perintis.
- Spielberger, C. D. (1979). *Understanding Stress and Anxiety*. Harper and Row Publisher.
- Sudaryono. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Graha Ilmu.
- Sudijono, A. (1998). *Pengantar evaluasi pendidikan*. PT RajaGrafindo.
- Walgito, B. (2012). *Psikologi Umum*. Penerbit ANDI.
- Wawancara dengan Abdullah Hayat, S.Pd.I. pada 19 November 2024
- Wirata, G. (2024). *Etika dalam Kebijakan: Memahami Implikasi Moral dari Keputusan Publik*. Literasi Nusantara Abadi.